



Tantangan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dalam Program Banyuwangi Hijau di Desa Balak

Challenges in Implementing Waste Management Policies in the Banyuwangi Hijau Program in Balak Village

Ali Wafa 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

Correspondence: Ali Wafa [aliwafa030321@gmail.com]

Kata Kunci: Banyuwangi Hijau; Kebijakan Lingkungan; Pengelolaan Sampah; Pemerintah Desa; Keberlanjutan

Keywords: *Banyuwangi Hijau; Environmental Policy; Waste Management; Village Government; Sustainability*

ABSTRAK

Semakin banyak kebijakan pengelolaan sampah dikembangkan di tingkat lokal sebagai respons terhadap meningkatnya timbulan sampah rumah tangga, namun berbagai daerah masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Banyuwangi Hijau di Desa Balak, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Proses coding dan pemetaan tema didukung oleh perangkat lunak NVivo 12 Plus melalui fitur *group query*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Banyuwangi Hijau didukung oleh Peraturan Desa Balak Nomor 3 Tahun 2023 yang menginstitutionalisasi program ke dalam tata kelola desa. Pemerintah desa berperan sebagai pembuat kebijakan lokal, pelaksana program, dan penggerak partisipasi masyarakat, sementara pengolahan sampah dilakukan melalui TPS 3R yang menjadi bagian dari Banyuwangi Hijau. Tingkat partisipasi masyarakat tergolong tinggi dengan 818 kepala keluarga atau 67,16% dari total rumah tangga telah menjadi pelanggan layanan. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa tantangan implementasi tidak lagi terletak pada partisipasi masyarakat, melainkan pada kapasitas pelayanan dalam mengelola partisipasi yang telah dicapai. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran isu implementasi kebijakan pengelolaan sampah, dari persoalan partisipasi masyarakat menuju persoalan kapasitas layanan.

ABSTRACT

More and more waste management policies are being developed at the local level in response to the increasing volume of household waste, yet many regions still face challenges in achieving effective and sustainable waste management. This study aims to analyze the implementation of the Green Banyuwangi Program in Balak Village, Songgon Subdistrict, Banyuwangi Regency. The study employed a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted using the Miles, Huberman, and Saldaña model, which encompasses data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The coding and theme mapping processes were supported by NVivo 12 Plus software using the group query feature. The results of the study indicate that the implementation of the Banyuwangi Hijau Program is supported by Balak Village Regulation No. 3 of 2023, which institutionalizes the program within the village governance framework. The village government serves as the local policy maker, program implementer, and driver of community participation, while waste management is carried out through the 3R Waste Collection Point (TPS 3R), which is part of the Banyuwangi Hijau Program. The level of community participation is relatively high, with 818 households—or 67.16% of all households—having signed up for the service. However, the study found that the challenge in implementation no longer lies in community participation but rather in the service capacity to manage the level of participation that has already been achieved. This finding indicates a shift in the issues surrounding the implementation of waste management policies, from the problem of community participation to the problem of service capacity.

1 | Pendahuluan

Meskipun kebijakan pengelolaan sampah di tingkat lokal terus berkembang, tantangan implementasinya masih menjadi persoalan yang kompleks. Peningkatan jumlah penduduk berimplikasi langsung terhadap peningkatan volume sampah yang dihasilkan setiap hari, baik berupa sampah organik maupun anorganik (Diani *et al.*, 2024). Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, karena pengelolaan sampah yang tidak optimal

dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran tanah, air, dan udara, serta gangguan kesehatan masyarakat (Yuliyanti *et al.*, 2024; Hafizah *et al.*, 2023). Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak lagi dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan telah menjadi bagian penting dari tata kelola dan kebijakan publik yang membutuhkan keterlibatan berbagai aktor, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat (Debrah *et al.*, 2022; Hemidat *et al.*, 2022).

This is an open access article under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). This license requires that reusers give credit to the creator. It allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, even for commercial purposes. If others remix, adapt, or build upon the material, they must license the modified material under identical terms.

Di Indonesia, persoalan sampah masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah pusat maupun daerah. Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan berbagai kebijakan turunannya, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di berbagai daerah menunjukkan hasil yang beragam. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah seringkali menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, minimnya sarana dan prasarana, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar organisasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat (Manalu *et al.*, 2022; Astuti & Kamil, 2024; Putriani, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut secara efektif.

Berbagai negara juga menghadapi tantangan yang serupa. Penelitian Debrah *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan sampah di negara-negara Sub-Sahara Afrika masih terkendala oleh rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan pendanaan, lemahnya dukungan kebijakan, dan minimnya komitmen politik. Sementara itu, Hemidat *et al.*, (2022) menemukan bahwa sebagian besar negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) masih menghadapi persoalan kelembagaan, pendanaan, dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berorientasi pada ekonomi sirkular. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan implementasi kebijakan pengelolaan sampah, merupakan fenomena global yang memerlukan pendekatan multidimensional.

Dalam beberapa tahun terakhir, paradigma pengelolaan sampah mengalami pergeseran dari pendekatan konvensional yang berorientasi pada pengumpulan dan pembuangan, menuju pendekatan yang lebih berkelanjutan melalui konsep *circular economy*. Pendekatan ini menempatkan sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali melalui kegiatan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*) (3R). Penelitian Sapanli *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa penerapan konsep ekonomi sirkular pada pengelolaan sampah rumah tangga di tingkat desa mampu mengurangi timbulan sampah, menurunkan emisi lingkungan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Kurniawan *et al.*, (2022) yang menegaskan bahwa transformasi pengelolaan sampah menuju ekonomi sirkular memerlukan dukungan teknologi, kelembagaan, serta partisipasi masyarakat yang kuat. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya diukur dari berkurangnya volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, tetapi juga dari kemampuan sistem pengelolaan dalam menciptakan nilai tambah ekonomi dan lingkungan secara berkelanjutan.

Di tingkat lokal, pemerintah daerah di Indonesia terus berupaya mengembangkan berbagai program pengelolaan sampah. Salah satu daerah yang menunjukkan komitmen dalam pengelolaan lingkungan adalah Kabupaten Banyuwangi, melalui Program Banyuwangi Hijau. Program ini merupakan bagian dari strategi pembangunan daerah yang bertujuan mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dalam implementasinya, pemerintah desa menjadi aktor penting, karena berada pada level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga memiliki peran strategis dalam menggerakkan partisipasi warga, serta memastikan keberlangsungan program di tingkat akar rumput.

Desa Balak di Kecamatan Songgon merupakan salah satu desa yang melaksanakan Program Banyuwangi Hijau. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, mulai dari sosialisasi hingga

penyediaan layanan pengangkutan sampah yang terintegrasi dengan tempat pengelolaan sampah (TPS) 3R. Kondisi ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang lebih baik. Namun demikian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat desa, tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program.

Kajian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Manalu *et al.*, (2022) menemukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Binjai menghadapi hambatan berupa belum tersedianya regulasi pendukung yang memadai, keterbatasan anggaran, kualitas sumber daya manusia yang rendah, serta minimnya dukungan pimpinan. Astuti & Kamil (2024) juga menemukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Pasirlayung Kota Bandung belum berjalan optimal akibat keterbatasan anggaran, lemahnya komunikasi eksternal, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan bank sampah. Penelitian Putriani (2025) menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di tingkat desa dan kelurahan masih menghadapi kendala sumber daya manusia dan keterbatasan pendanaan, meskipun komunikasi kebijakan telah berjalan dengan baik.

Selain itu, penelitian Tampubolon *et al.*, (2023) menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan faktor kunci dalam mendukung pelaksanaan program pengurangan sampah berbasis 3R. Temuan serupa dikemukakan oleh Rafidah *et al.*, (2025) yang menemukan bahwa penerapan prinsip 3R di Desa Gattareng masih belum optimal karena rendahnya edukasi, keterbatasan sarana pendukung, dan persepsi ekonomi masyarakat terhadap kegiatan daur ulang. Sementara itu, Irawati & Amin (2024) menunjukkan bahwa nilai budaya lokal seperti Tri Hita Karana dapat menjadi modal sosial yang kuat, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber.

Pada konteks internasional, Jiang (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pemilahan sampah dipengaruhi oleh strategi yang digunakan pemerintah dalam mendorong keterlibatan masyarakat. Penelitian tersebut menemukan bahwa pendekatan yang menggabungkan mobilisasi administratif dan partisipasi masyarakat menghasilkan implementasi kebijakan yang lebih efektif. Fadhullah *et al.*, (2022) juga menemukan bahwa perilaku pemilahan sampah rumah tangga sangat dipengaruhi oleh karakteristik sosial-demografis dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap dampak lingkungan. Penelitian Wu *et al.*, (2022) lebih lanjut menjelaskan bahwa pengetahuan lingkungan, norma sosial, dan kontrol perilaku yang dirasakan memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku pengelolaan sampah individu.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah umumnya menghadapi hambatan berupa rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan (Astuti & Kamil, 2024; Fadhullah *et al.*, 2022; Rafidah *et al.*, 2025). Dalam konteks tersebut, peningkatan partisipasi masyarakat sering diposisikan sebagai prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan. Namun, kondisi yang ditemukan di Desa Balak menunjukkan dinamika yang sedikit berbeda. Keterlibatan masyarakat dalam Program Banyuwangi Hijau relatif telah terbentuk melalui sistem pengelolaan sampah yang dikembangkan bersama pemerintah desa. Tantangan yang muncul justru berkaitan dengan kemampuan pelayanan dan kapasitas.

Kedua, sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada tingkat kabupaten/kota, dengan fokus pada peran pemerintah daerah sebagai pelaksana utama kebijakan (Manalu *et al.*, 2022; Astuti & Kamil, 2024; Jiang, 2022; Hossain *et al.*, 2025). Penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui keterlibatan desa masih relatif terbatas. Padahal, desa memiliki karakteristik kelembagaan, sumber daya, dan pola hubungan sosial yang berbeda dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan pengelolaan sampah diimplementasikan pada konteks pemerintahan desa.

Ketiga, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan perspektif implementasi kebijakan yang berfokus pada faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana dikembangkan oleh Edwards III. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perspektif implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang menekankan dua dimensi utama, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Perspektif tersebut dipandang lebih relevan, untuk menjelaskan bagaimana isi kebijakan dan lingkungan implementasi saling berinteraksi dalam menentukan keberhasilan pengelolaan sampah bersama dengan desa.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan implementasi kebijakan pengelolaan sampah, pada Program Banyuwangi Hijau di Desa Balak, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Secara khusus, penelitian ini berupaya mengidentifikasi bagaimana *content of policy* dan *context of implementation*, mempengaruhi pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan publik, khususnya pada sektor pengelolaan lingkungan di tingkat desa, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam memperkuat tata kelola persampahan yang berkelanjutan.

2 | Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik, karena menentukan sejauh mana tujuan yang telah dirumuskan dapat diwujudkan dalam praktik. Kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan menghasilkan perubahan yang diharapkan, apabila tidak diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, implementasi dipahami sebagai proses yang menghubungkan tujuan kebijakan dengan hasil yang diterima oleh kelompok sasaran. Dalam proses tersebut, berbagai aktor, sumberdaya, serta kondisi lingkungan berinteraksi dan mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan suatu kebijakan (Hill & Hupe, 2021).

Dalam kajian implementasi kebijakan, salah satu model yang banyak digunakan untuk menjelaskan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik adalah model implementasi yang dikemukakan oleh Grindle (2017). Grindle memandang bahwa implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan yang dirumuskan, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat kebijakan tersebut dijalankan. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi merupakan hasil interaksi antara isi *content of policy* dan *context of implementation*. Perspektif ini relevan digunakan untuk menganalisis kebijakan pengelolaan sampah, karena keberhasilannya tidak hanya bergantung pada regulasi yang dibuat, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan, dukungan sumberdaya, serta keterlibatan berbagai aktor dalam pelaksanaannya.

Menurut Grindle (2017), dimensi *content of policy* berkaitan dengan karakteristik kebijakan yang diimplementasikan. Dimensi ini mencakup kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, manfaat yang dihasilkan, tingkat perubahan yang diharapkan, lokasi pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung implementasi. Keenam aspek tersebut menentukan tingkat kemudahan maupun kesulitan suatu kebijakan untuk dilaksanakan. Kebijakan yang mampu memberikan manfaat yang jelas, didukung oleh sumber daya yang memadai, serta memiliki struktur pelaksana yang jelas, cenderung lebih mudah diimplementasikan, dibandingkan kebijakan yang membutuhkan perubahan perilaku yang besar namun tidak didukung oleh sumber daya yang memadai.

Dalam konteks pengelolaan sampah, dimensi isi kebijakan menjadi penting karena program tidak hanya berorientasi pada penyediaan layanan persampahan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat agar berpartisipasi dalam sistem pengelolaan sampah yang telah dibangun. Oleh karena itu, implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan, serta kejelasan peran antar aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Selain isi kebijakan, Grindle (2017) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh *context of implementation*. Dimensi ini menekankan pentingnya kondisi lingkungan yang melingkupi pelaksanaan kebijakan. Konteks implementasi mencakup hubungan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik institusi pelaksana, serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap para pelaksana kebijakan. Lingkungan implementasi yang kondusif akan mempermudah pencapaian tujuan kebijakan, sedangkan lingkungan yang ditandai oleh lemahnya koordinasi, konflik kepentingan, atau rendahnya kapasitas kelembagaan dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

Pada Program Banyuwangi Hijau, konteks implementasi menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan, karena pelaksanaan program melibatkan berbagai aktor dengan peran yang berbeda. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Lingkungan Hidup bersama Systemiq berperan dalam mengembangkan program dan memberikan pendampingan kepada pemerintah desa. Di sisi lain, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menyusun regulasi desa, mengorganisasi pelaksanaan program, serta mendorong partisipasi masyarakat. Masyarakat sendiri berperan sebagai kelompok sasaran yang menentukan keberlanjutan program melalui keterlibatan dalam sistem pelayanan pengelolaan sampah yang telah dibangun. Interaksi antar pemangku kepentingan tersebut, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai proses sosial dan kelembagaan yang melibatkan berbagai kepentingan dan sumber daya.

Pemilihan teori implementasi kebijakan Grindle dalam penelitian ini didasarkan pada kemampuannya menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, maupun tantangan implementasi kebijakan secara komprehensif. Teori ini tidak hanya memperhatikan aspek substansi kebijakan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi kelembagaan dan hubungan antar aktor yang berkembang selama proses implementasi berlangsung. Dengan menggunakan perspektif tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis tantangan implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Program Banyuwangi Hijau di Desa Balak, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan program.

3 | Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Program Banyuwangi Hijau di Desa Balak. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali pengalaman, persepsi, dan dinamika yang terjadi selama pelaksanaan program dari berbagai aktor yang terlibat (Gerring, 2017). Lokasi penelitian berada di Desa Balak, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan bahwa desa merupakan pelaksana program Banyuwangi Hijau; memiliki peraturan desa tentang pengelolaan sampah; dan TPS 3R yang berada dalam wilayah Desa Balak. Penelitian dilakukan sepanjang bulan April tahun 2024.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive* sampling, yaitu memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program. Informan penelitian terdiri atas unsur pemerintah desa dan masyarakat yang menjadi peserta layanan pengelolaan sampah. Pemilihan informan dilakukan hingga data yang diperoleh mencapai tingkat kejenuhan (*data saturation*) (Fusch & Ness, 2015)

Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program dan tantangan implementasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan layanan pengelolaan sampah dan aktivitas masyarakat. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan, seperti peraturan desa, laporan kegiatan, profil program, dan dokumen pendukung lainnya. Keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian (Maxwell, 2008).

Analisis data menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles *et al.*, (2014), yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Pada tahap kondensasi data, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ditranskrip, diseleksi, dikategorikan, dan dikodekan sesuai fokus penelitian. Untuk meningkatkan sistematika dan ketelitian analisis, proses coding dilakukan dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 Plus. Melalui aplikasi tersebut, data wawancara diklasifikasikan ke dalam tema-tema yang relevan dengan implementasi Program Banyuwangi Hijau, kemudian dianalisis menggunakan fitur *group query* untuk memetakan hubungan antara informan dan tema-tema yang muncul dalam data penelitian. Hasil *group query* digunakan untuk mengidentifikasi tema dominan, intensitas kemunculan tema, serta pola keterkaitan antar aktor dalam implementasi program. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Grindle (2017), yang menitikberatkan pada dua dimensi utama, yaitu *content of policy* dan *context of implementation*. Kerangka tersebut digunakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam Program Banyuwangi Hijau di Desa Balak, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika implementasi kebijakan pada tingkat lokal.

4 | Hasil

4.1 | Program Banyuwangi Hijau dan Pemerintah Desa

Implementasi Program Banyuwangi Hijau di Desa Balak dilaksanakan melalui Peraturan Desa Balak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah desa dalam mengorganisasi partisipasi masyarakat, serta menyelenggarakan sistem pelayanan persampahan yang terhubung dengan mekanisme pengelolaan sampah Program Banyuwangi Hijau. Program ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan pengelolaan sampah, melalui pendekatan ekonomi sirkular yang terintegrasi dengan fasilitas Tempat Pengolahan Sampah TPS 3R.

TPS 3R Balak sebagai pusat pengolahan sampah dalam Program Banyuwangi Hijau, tidak dibangun dan dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa. Fasilitas tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan PT Systemiq Lestari Indonesia yang didukung oleh Pemerintah Norwegia, Borealis, USAID, serta sejumlah lembaga pendonor internasional lainnya. Dalam skema ini, TPS 3R berfungsi sebagai pusat pengolahan sampah yang menerima sampah rumah tangga dari berbagai desa, yang menjadi bagian dari Program Banyuwangi Hijau. Sampah yang telah dipilah dari sumber kemudian diolah melalui sistem pengelolaan sirkular, sehingga memiliki nilai guna dan nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan pola pengelolaan sampah konvensional.

Berbeda dengan model pengelolaan sampah berbasis desa yang menempatkan pemerintah desa sebagai pengelola utama sistem persampahan, Program Banyuwangi Hijau memosisikan pemerintah desa sebagai aktor implementasi yang bertugas menerjemahkan tujuan program ke dalam kebijakan dan praktik di tingkat lokal. Pemerintah desa berperan sebagai penghubung antara sistem pengelolaan sampah yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Systemiq dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran program. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi program sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam membangun partisipasi masyarakat dan memastikan sistem pelayanan berjalan secara efektif.

Sekretaris Desa Balak menjelaskan bahwa pemerintah desa memiliki peran dalam menyusun regulasi, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mengorganisasi keanggotaan layanan persampahan, serta memastikan masyarakat berpartisipasi dalam program yang telah dikembangkan (Triandoko, komunikasi personal, 2024). Peran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak bertindak sebagai pengelola akhir sampah, melainkan sebagai pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab mengintegrasikan masyarakat ke dalam sistem pengelolaan sampah yang telah dibangun melalui Program Banyuwangi Hijau.

Secara kelembagaan, Peraturan Desa Balak Nomor 3 Tahun 2023 memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan program melalui pengaturan hak dan kewajiban masyarakat, mekanisme pelayanan persampahan, sistem pembiayaan melalui iuran, serta ketentuan mengenai pemilahan sampah dari sumber. Keberadaan regulasi tersebut menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa tujuan Program Banyuwangi Hijau dapat diimplementasikan secara operasional di tingkat desa. Dengan demikian, pemerintah desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai institusi yang membangun kerangka tata kelola lokal untuk mendukung keberhasilan program.

Pelaksanaan program diawali dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga. Kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap melalui pertemuan warga, forum RT/RW, serta

kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. Melalui proses sosialisasi tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai tujuan Program Banyuwangi Hijau, manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan sampah yang lebih baik, mekanisme keanggotaan layanan persampahan, jadwal pengangkutan sampah, kewajiban pembayaran iuran, serta tata cara pemilahan sampah organik dan anorganik sebelum diangkut oleh petugas.

Proses sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan pemerintah desa bersama pihak terkait berkontribusi terhadap meningkatnya penerimaan masyarakat terhadap program. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai aktor yang berperan aktif dalam proses pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber. Kondisi tersebut menjadi fondasi penting bagi implementasi Program Banyuwangi Hijau di Desa Balak, karena keberhasilan sistem pengelolaan sampah sirkular sangat bergantung pada konsistensi perilaku masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.

4.2 | Partisipasi Masyarakat dalam Program Banyuwangi Hijau di Desa Balak

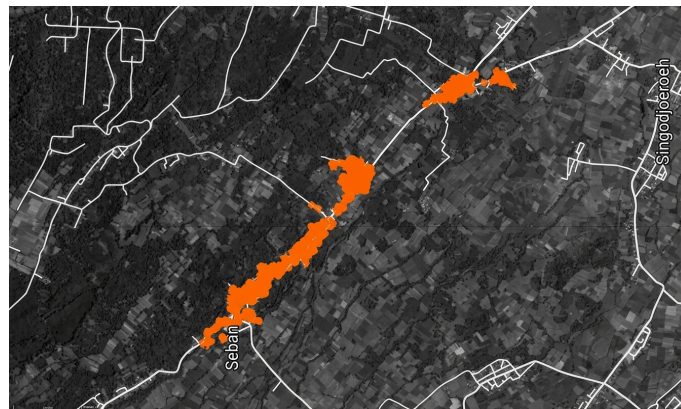
Masyarakat Desa Balak memberikan respons yang relatif positif terhadap implementasi Program Banyuwangi Hijau. Hingga April 2024, jumlah rumah tangga yang terdaftar sebagai pengguna layanan program mencapai 818 kepala keluarga atau sekitar 67,16% dari total 1.218 kepala keluarga yang ada di Desa Balak. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah terintegrasi ke dalam sistem pengelolaan sampah yang dikembangkan melalui Program Banyuwangi Hijau. Tingkat keterlibatan tersebut menjadi indikator penting bahwa program memperoleh penerimaan yang cukup baik dari kelompok sasaran kebijakan.

Partisipasi masyarakat dalam program tidak hanya diwujudkan melalui keanggotaan sebagai pengguna layanan, tetapi juga melalui keterlibatan aktif dalam mekanisme pengelolaan sampah yang telah ditetapkan. Sebagai anggota program, masyarakat berkewajiban melakukan pemilahan sampah dari sumber, menyediakan sampah sesuai jadwal pengangkutan, serta membayar iuran pelayanan secara rutin. Sampah yang telah dipilah selanjutnya diangkut oleh petugas menuju TPS 3R untuk diolah melalui sistem pengelolaan sampah sirkular.

Keberadaan layanan pengangkutan sampah telah mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Sebelum program dilaksanakan, sebagian masyarakat masih mengandalkan praktik pembakaran sampah atau pembuangan sampah secara mandiri. Setelah program berjalan, masyarakat mulai menyesuaikan perilakunya dengan melakukan pemilahan sampah dan memanfaatkan layanan pengangkutan yang tersedia. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi program tidak hanya menghasilkan peningkatan partisipasi secara kuantitatif, tetapi juga mendorong transformasi praktik pengelolaan sampah pada tingkat rumah tangga. Keberadaan layanan pengangkutan sampah memberikan kemudahan bagi masyarakat karena sampah rumah tangga tidak lagi harus dibuang atau dibakar secara mandiri sebagaimana yang dilakukan sebelumnya. Sampah yang telah dipilah dapat diangkut secara rutin oleh petugas sehingga lingkungan permukiman menjadi lebih bersih dan tertata (Munir, komunikasi personal, 2024). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa manfaat program dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama dalam aspek kemudahan pengelolaan sampah dan peningkatan kualitas lingkungan.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh beberapa informan lain, yang menilai bahwa Program Banyuwangi Hijau telah

memberikan alternatif pengelolaan sampah yang lebih teratur dibandingkan praktik yang dilakukan sebelumnya. Keberadaan sistem pengangkutan terjadwal dan kewajiban pemilahan sampah dari sumber mendorong masyarakat untuk lebih bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam Program Banyuwangi Hijau tidak hanya tercermin dari tingginya jumlah pengguna layanan, tetapi juga dari munculnya perubahan perilaku yang mendukung tujuan program dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Sebaran rumah tangga pengguna layanan Program Banyuwangi Hijau di Desa Balak dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Sebaran Masyarakat Pengguna Layanan.

4.3 | Dampak Implementasi Program

Program Banyuwangi Hijau mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Sebelum program berjalan, sebagian masyarakat masih mencampurkan seluruh jenis sampah dan membuangnya tanpa proses pemilahan. Setelah program diimplementasikan, masyarakat mulai terbiasa memisahkan sampah berdasarkan jenisnya sesuai arahan yang diberikan selama proses sosialisasi.

Masyarakat mulai memahami pentingnya pemilahan sampah karena program menyediakan sarana pendukung dan memberikan edukasi secara konsisten mengenai pengelolaan sampah rumah tangga (Anas, komunikasi personal, 2024). Perubahan perilaku tersebut menunjukkan bahwa implementasi program tidak hanya menghasilkan keluaran berupa layanan pengangkutan sampah, tetapi juga menghasilkan perubahan pada aspek kesadaran dan kebiasaan masyarakat. Selain mendorong perubahan perilaku, program juga berkontribusi terhadap pengurangan timbulan sampah yang berpotensi mencemari lingkungan desa. Keberadaan sistem pengangkutan yang terjadwal membuat sampah rumah tangga dapat dikelola secara lebih teratur dibandingkan sebelum program dilaksanakan (Triandoko, komunikasi personal, 2024).

4.4 | Tantangan Implementasi Program Banyuwangi Hijau di Desa Balak

Meskipun implementasi Program Banyuwangi Hijau di Desa Balak menunjukkan capaian yang cukup positif, penelitian ini menemukan bahwa program masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan kapasitas pelayanan yang mendukung operasional program. Seiring meningkatnya jumlah rumah tangga yang bergabung sebagai pengguna layanan, kebutuhan terhadap pelayanan pengumpulan dan pengangkutan sampah juga mengalami peningkatan. Dalam kondisi tertentu, kapasitas pelayanan yang tersedia belum sepenuhnya mampu mengimbangi pertumbuhan partisipasi masyarakat tersebut.

Beberapa informan mengungkapkan bahwa jadwal pengambilan sampah belum selalu berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Misbahul Munir menjelaskan bahwa, layanan pengangkutan sampah pada dasarnya sangat membantu masyarakat karena mengurangi praktik pembakaran maupun pembuangan sampah secara mandiri. Namun demikian, dalam beberapa kesempatan pengambilan sampah tidak dilakukan sesuai jadwal, sehingga sampah yang telah dipilah harus disimpan lebih lama sebelum diangkut oleh petugas (Munir, komunikasi personal, 2024).

Keluhan serupa disampaikan oleh Bahrul Anam yang menilai bahwa keterlambatan pengangkutan sampah menjadi salah satu persoalan yang paling sering dirasakan masyarakat. Menurutnya, keterlambatan tersebut menyebabkan sampah organik yang telah dipilah menimbulkan aroma tidak sedap, terutama ketika volume sampah rumah tangga sedang meningkat. Ia juga menyampaikan bahwa frekuensi pengangkutan sampah masih perlu ditingkatkan agar pelayanan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Anam, komunikasi personal, 2024).

Sementara itu, Muhammad Nasrul Anas menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas operasional program. Menurutnya, penambahan jumlah rumah tangga yang bergabung dalam Program Banyuwangi Hijau, perlu diimbangi dengan penambahan dukungan operasional, baik berupa petugas maupun sarana pengangkutan. Tanpa penguatan kapasitas tersebut, kualitas pelayanan berpotensi menurun seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna layanan (Anas, komunikasi personal, 2024).

Dari perspektif pemerintah desa, tantangan tersebut dipahami sebagai konsekuensi dari meningkatnya cakupan program. Hingga April 2024, jumlah rumah tangga yang telah bergabung mencapai 818 kepala keluarga atau sekitar 67,16% dari total 1.218 kepala keluarga di Desa Balak. Pemerintah desa bahkan menargetkan seluruh rumah tangga dapat terintegrasi ke dalam sistem pengelolaan sampah Program Banyuwangi Hijau. Namun demikian, perluasan cakupan layanan tersebut membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai agar kualitas pelayanan tetap terjaga dan tujuan program dapat dicapai secara berkelanjutan (Triandoko, komunikasi personal, 2024).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan implementasi Program Banyuwangi Hijau di Desa Balak tidak hanya terletak pada upaya membangun penerimaan masyarakat terhadap program. Tingkat partisipasi yang telah mencapai lebih dari dua pertiga rumah tangga desa menunjukkan kinerja program yang cukup memuaskan. Tantangan yang muncul justru berkaitan dengan kemampuan sistem pelayanan dan kelembagaan program dalam mengelola partisipasi yang terus berkembang. Dengan demikian, isu implementasi bergeser dari persoalan partisipasi menuju persoalan kapasitas layanan dan keberlanjutan operasional program.

Gambar 2 memperlihatkan hasil *group query* yang memetakan hubungan antara informan dengan tema-tema utama yang muncul dalam proses *coding* data wawancara. Pada sisi kiri ditampilkan sumber data yang terdiri atas tiga informan masyarakat dan satu informan pemerintah desa, sedangkan pada sisi kanan ditampilkan tema-tema utama hasil analisis. Ketebalan garis menunjukkan tingkat keterkaitan antara informan dan tema tertentu, sementara jumlah referensi menggambarkan intensitas kemunculan tema dalam keseluruhan data.

Visualisasi menunjukkan bahwa tema pelayanan pengangkutan sampah merupakan tema yang paling dominan dengan total 20 referensi. Tema ini muncul pada seluruh informan dan menjadi isu yang paling sering dibahas dalam wawancara. Dominasi tema tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan menjadi faktor yang sangat menentukan persepsi masyarakat terhadap keberhasilan Program Banyuwangi Hijau. Meskipun masyarakat telah bersedia berpartisipasi dalam program, keberlanjutan partisipasi tersebut sangat dipengaruhi oleh konsistensi layanan yang diterima.

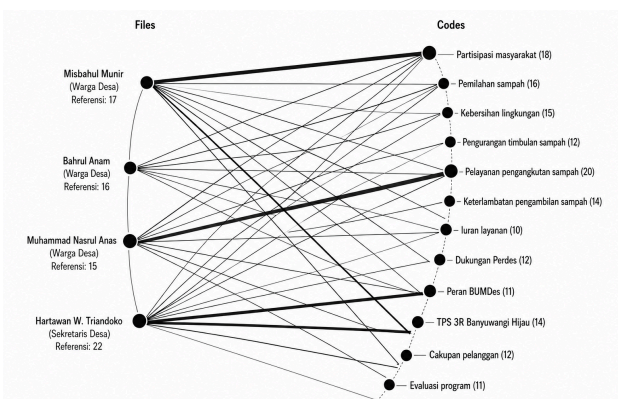
Tema dominan berikutnya adalah partisipasi masyarakat (18 referensi) dan pemilahan sampah (16 referensi). Tingginya frekuensi kemunculan kedua tema tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima layanan, tetapi juga telah terlibat dalam praktik pengelolaan sampah yang menjadi prasyarat utama sistem Banyuwangi Hijau. Temuan ini sejalan dengan data keanggotaan program yang menunjukkan bahwa 818 kepala keluarga atau 67,16% rumah tangga di Desa Balak telah menjadi pengguna layanan aktif.

Di sisi lain, tema keterlambatan pengambilan sampah muncul sebanyak 14 referensi dan terutama disampaikan oleh kelompok masyarakat. Tema ini memperkuat temuan bahwa persoalan utama implementasi bukan lagi rendahnya partisipasi masyarakat, melainkan keterbatasan kapasitas operasional dalam melayani partisipasi yang telah terbentuk. Dengan kata lain, tantangan implementasi bergeser dari aspek *demand side* menuju aspek *service delivery capacity*.

Visualisasi juga memperlihatkan kemunculan tema TPS 3R Banyuwangi Hijau, dukungan Peraturan Desa, dan peran BUMDes yang lebih banyak dikaitkan dengan informan pemerintah desa. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi program tidak hanya ditopang oleh keterlibatan masyarakat, tetapi juga oleh dukungan kelembagaan yang menghubungkan masyarakat dengan sistem pengelolaan sampah Banyuwangi Hijau. Dalam konteks ini, pemerintah desa berperan sebagai pembuat regulasi lokal, pengorganisasi layanan, serta penggerak partisipasi masyarakat, sedangkan pengolahan sampah dilakukan melalui TPS 3R yang menjadi bagian dari ekosistem Program Banyuwangi Hijau.

Secara keseluruhan, hasil *group query* menunjukkan bahwa implementasi Program Banyuwangi Hijau di Desa Balak ditopang oleh tiga elemen utama, yaitu partisipasi masyarakat yang relatif tinggi, perubahan perilaku melalui praktik pemilahan sampah, dan dukungan kelembagaan desa yang kuat. Namun demikian, keberhasilan tersebut mulai menghadapi tantangan berupa meningkatnya kebutuhan pelayanan yang belum sepenuhnya diimbangi oleh kapasitas operasional program. Oleh karena itu, penguatan implementasi pada masa mendatang perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas layanan, efisiensi operasional, dan penguatan kelembagaan agar mampu mengelola partisipasi masyarakat yang terus berkembang.

Temuan ini memperlihatkan karakteristik implementasi yang berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang menempatkan rendahnya partisipasi masyarakat sebagai hambatan utama pengelolaan sampah. Pada kasus Desa Balak, partisipasi masyarakat justru telah terbentuk dalam tingkat yang



Gambar 2. *Group Query*.

relatif tinggi. Persoalan implementasi bergeser pada kemampuan sistem dan kelembagaan dalam mempertahankan kualitas layanan, ketika jumlah pengguna program terus meningkat. Pergeseran isu ini menjadi temuan penting karena menunjukkan bahwa keberhasilan membangun partisipasi masyarakat harus diikuti oleh kemampuan kelembagaan untuk mengelola dan mempertahankan partisipasi tersebut secara berkelanjutan.

5| Diskusi

5.1 | Tujuan Kebijakan dan Desain Program Banyuwangi Hijau

Implementasi perlu dipahami dari tujuan kebijakan yang ingin dicapai. Program Banyuwangi Hijau pada dasarnya dirancang untuk mengurangi timbulan sampah rumah tangga melalui pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan TPS 3R. Berbeda dengan model pengelolaan sampah berbasis desa yang menempatkan desa sebagai pengelola utama, Program Banyuwangi Hijau membangun sistem kolaboratif antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Systemiq, pemerintah desa, dan masyarakat. Dalam skema ini, desa berfungsi sebagai pembuat kebijakan lokal melalui Peraturan Desa, pelaksana program, sekaligus penggerak partisipasi masyarakat, sedangkan pengolahan sampah dilakukan secara terpusat pada TPS 3R Banyuwangi Hijau. Desain kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat menjadi tujuan utama program. Dengan demikian, keberhasilan implementasi tidak hanya diukur dari berkurangnya volume sampah, tetapi juga dari kemampuan program membangun partisipasi masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah yang telah dirancang.

5.2 | Isi Kebijakan sebagai Fondasi Implementasi Program Banyuwangi Hijau

Dalam perspektif Grindle (2017), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik *content of policy* yang meliputi kepentingan yang dipengaruhi (*interests affected*), manfaat yang dihasilkan (*type of benefits*), tingkat perubahan yang diharapkan (*extent of change envisioned*), lokasi pengambilan keputusan (*site of decision making*), pelaksana program (*program implementers*), serta sumber daya yang dialokasikan (*resources committed*). Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Banyuwangi Hijau di Desa Balak memperoleh dukungan yang kuat dari sisi isi kebijakan, terutama melalui Peraturan Desa Balak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Kehadiran peraturan desa tersebut menunjukkan bahwa Program Banyuwangi Hijau tidak berhenti pada tataran program teknis pengangkutan sampah, tetapi telah diinstitutionalisasi menjadi kebijakan lokal yang mengatur pembagian peran, mekanisme pelayanan, kewajiban masyarakat, sumber pembiayaan, hingga sistem pengawasan dan sanksi.

Pada dimensi *interests affected*, kebijakan yang dibangun mampu mengakomodasi kepentingan berbagai aktor yang terlibat dalam implementasi program. Bagi masyarakat, kebijakan tersebut memberikan akses terhadap sistem pelayanan persampahan yang lebih teratur sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Bagi pemerintah desa, kebijakan menjadi instrumen untuk mengatasi persoalan persampahan yang selama ini sulit ditangani secara mandiri. Di sisi lain, bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan PT Systemiq Lestari Indonesia, keberadaan regulasi desa menjadi sarana untuk memperluas jangkauan Program Banyuwangi Hijau hingga tingkat rumah tangga. Bahkan, dalam konteks yang lebih luas, implementasi program juga didukung oleh Pemerintah Norwegia, Borealis, USAID, dan sejumlah lembaga donor yang berkontribusi dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah sirkular melalui TPS

3R Banyuwangi Hijau. Keselarasan kepentingan tersebut tercermin dalam tujuan pengelolaan sampah yang termuat dalam Pasal 2 Peraturan Desa Balak, yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, menjadikan sampah sebagai sumber daya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya berorientasi pada aspek lingkungan, tetapi juga mengandung tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Pada dimensi *type of benefits*, manfaat kebijakan dapat dirasakan secara langsung oleh kelompok sasaran. Informan penelitian menyampaikan bahwa keberadaan Program Banyuwangi Hijau telah mengurangi praktik pembakaran dan pembuangan sampah sembarangan serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Lingkungan permukiman menjadi lebih bersih dan masyarakat memperoleh kepastian mengenai mekanisme pengelolaan sampah yang sebelumnya tidak tersedia. Menurut Grindle (2017), manfaat yang dapat dirasakan secara langsung cenderung meningkatkan dukungan masyarakat terhadap suatu kebijakan karena kelompok sasaran mampu melihat hasil nyata dari implementasi kebijakan tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian Astuti & Kamil (2024) yang menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah meningkat, ketika manfaat program dapat dirasakan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari.

Pada dimensi *extent of change envisioned*, Program Banyuwangi Hijau tidak hanya bertujuan menyediakan layanan pengangkutan sampah, tetapi juga mendorong transformasi perilaku masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Perubahan tersebut dilembagakan melalui Pasal 8 Peraturan Desa Balak yang mengatur kewajiban masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah, melakukan pemilahan sampah sesuai jenisnya, menyediakan tempat sampah rumah tangga, dan membayar iuran pelayanan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perubahan yang diharapkan bersifat substantif karena menasar perilaku sehari-hari masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perubahan tersebut mulai terwujud melalui tingginya tingkat keterlibatan masyarakat dalam program. Meskipun tingginya keterlibatan tersebut belum sepenuhnya dapat diartikan sebagai perubahan perilaku yang sempurna, capaian tersebut menunjukkan adanya penerimaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan sampah yang dibangun, dan menjadi indikasi awal terbentuknya perilaku baru dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Pada dimensi *site of decision making*, implementasi Program Banyuwangi Hijau menunjukkan pola pengambilan keputusan yang menarik. Program ini pada dasarnya merupakan inisiatif yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Systemiq melalui sistem pengelolaan sampah yang terhubung dengan TPS 3R. Namun demikian, implementasi pada tingkat rumah tangga tidak dilakukan melalui kebijakan kabupaten yang bersifat langsung, melainkan melalui pemanfaatan kewenangan desa. Pemerintah desa menggunakan ruang otonomi yang dimilikinya untuk menerbitkan Peraturan Desa Balak Nomor 3 Tahun 2023 sebagai instrumen pelaksanaan program. Dengan demikian, desa tidak berperan sebagai pengelola utama sistem pengolahan sampah, karena proses pengolahan tetap dilakukan melalui TPS 3R Banyuwangi Hijau, tetapi berfungsi sebagai pembuat kebijakan lokal, pengorganisasi pelayanan, dan penggerak partisipasi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi program berlangsung melalui mekanisme tata kelola multilevel yang menghubungkan kebijakan tingkat kabupaten dengan praktik pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga.

Pada dimensi *program implementers*, implementasi Program Banyuwangi Hijau melibatkan aktor yang beragam dengan fungsi yang saling melengkapi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam pembinaan dan fasilitasi program, PT Systemiq Lestari Indonesia bertanggung jawab dalam pendampingan teknis serta pengelolaan TPS 3R, pemerintah desa menjalankan fungsi regulasi dan koordinasi di tingkat lokal, sedangkan BUMDes "Sayu Suto" ditunjuk secara resmi melalui Pasal 9 Peraturan Desa sebagai penyelenggara jasa pelayanan sampah kepada masyarakat. Masyarakat sendiri berperan sebagai pengguna layanan sekaligus pelaku utama pemilahan sampah dari sumber. Struktur implementasi tersebut menunjukkan bahwa Program Banyuwangi Hijau tidak dijalankan melalui pendekatan birokratis tunggal, melainkan melalui tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, lembaga donor, kelembagaan desa, dan masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi program sangat bergantung pada kemampuan berbagai aktor tersebut, untuk menjalankan fungsi masing-masing secara terintegrasi.

Meskipun demikian, dimensi *resources committed* menunjukkan adanya tantangan yang perlu mendapat perhatian. Peraturan Desa Balak sebenarnya telah mengatur mekanisme pembiayaan melalui iuran pelayanan sampah sebagaimana tercantum dalam Pasal 10. Namun, peningkatan jumlah rumah tangga yang bergabung dalam program belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kapasitas operasional pelayanan. Beberapa informan mengeluhkan keterlambatan pengangkutan sampah yang menyebabkan sampah rumah tangga tersimpan lebih lama dari jadwal yang telah ditetapkan. Temuan ini menunjukkan adanya paradoks implementasi, yaitu ketika keberhasilan program dalam meningkatkan partisipasi masyarakat justru menghasilkan tekanan baru terhadap kapasitas layanan yang tersedia. Dengan kata lain, tantangan utama implementasi tidak lagi terletak pada upaya menarik partisipasi masyarakat, tetapi pada kemampuan sistem untuk mengelola partisipasi yang telah berhasil dibangun.

Selain itu, Peraturan Desa Balak juga memperlihatkan adanya upaya penguatan implementasi melalui instrumen pengendalian. Pasal 11 mengatur larangan membuang sampah di sungai, saluran *drainase*, dan fasilitas umum serta melarang pembakaran sampah yang berpotensi mencemari lingkungan. Ketentuan tersebut diperkuat melalui mekanisme sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 12. Keberadaan instrumen tersebut menunjukkan bahwa implementasi Program Banyuwangi Hijau tidak semata-mata mengandalkan kesadaran masyarakat, tetapi juga didukung oleh perangkat regulatif yang mampu menciptakan kepastian mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi perilaku. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Program Banyuwangi Hijau di Desa Balak tidak hanya ditentukan oleh tingginya partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah desa menginstitusionalisasikan program ke dalam kerangka kebijakan lokal yang mampu mengarahkan dan mengendalikan perilaku masyarakat.

5.3 | Institusionalisasi Program Banyuwangi Hijau dan Dinamika Implementasinya di Tingkat Desa

Selain dipengaruhi oleh isi kebijakan, [Grindle \(2017\)](#) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi juga ditentukan oleh *context of implementation* yang mencakup distribusi kekuasaan dan kepentingan para aktor, karakteristik kelembagaan yang mendukung pelaksanaan kebijakan, serta tingkat kepatuhan dan respon kelompok sasaran terhadap kebijakan. Dalam konteks Desa Balak, implementasi Program Banyuwangi Hijau menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Desa Balak Nomor 3 Tahun 2023, tetapi juga oleh kemampuan berbagai aktor untuk membangun tata kelola

kolaboratif yang menghubungkan kebijakan tingkat kabupaten dengan praktik pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga.

Pada dimensi *power, interests, and strategies of actors involved*, implementasi Program Banyuwangi Hijau memperlihatkan adanya konfigurasi kekuasaan dan kepentingan yang relatif saling mendukung. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Lingkungan Hidup memiliki kepentingan untuk meningkatkan pengurangan sampah dari sumber sekaligus memperluas cakupan layanan pengelolaan sampah rumah tangga sebagai bagian dari agenda pengelolaan sampah daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah kabupaten tidak membangun sistem pengelolaan yang sepenuhnya dikendalikan secara birokratis dari tingkat kabupaten, melainkan mendorong pemerintah desa memanfaatkan kewenangan otonominya untuk menyusun regulasi dan mengorganisasi partisipasi masyarakat.

Dalam proses tersebut, Systemiq berperan sebagai mitra strategis yang menyediakan pendampingan teknis dan kelembagaan, sekaligus mengelola fasilitas TPS 3R sebagai pusat pengolahan sampah Program Banyuwangi Hijau. Keberadaan TPS 3R Balak sendiri tidak dapat dilepaskan dari dukungan berbagai aktor internasional, termasuk Pemerintah Norwegia, Borealis, USAID, dan lembaga pendonor lainnya yang mendukung pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Program Banyuwangi Hijau tidak hanya melibatkan aktor lokal, tetapi juga merupakan bagian dari jejaring kolaborasi multiaktor yang menghubungkan pemerintah daerah, organisasi pendamping, sektor donor internasional, dan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Di tingkat desa, pemerintah Desa Balak memiliki kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih sekaligus menyediakan solusi terhadap persoalan sampah rumah tangga yang sebelumnya belum tertangani secara optimal. Kepentingan tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Desa Balak Nomor 3 Tahun 2023, pelaksanaan sosialisasi, pengorganisasian keanggotaan layanan, serta penguatan peran BUMDes sebagai penyelenggara layanan persampahan. Sementara itu, masyarakat memiliki kepentingan memperoleh layanan pengelolaan sampah yang mudah diakses, terjangkau, dan mampu mengurangi praktik pembuangan sampah secara sembarangan. Keselarasan kepentingan antar aktor tersebut menciptakan lingkungan implementasi yang relatif kondusif sehingga konflik kepentingan yang berpotensi menghambat implementasi program dapat diminimalkan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa implementasi Program Banyuwangi Hijau tidak berlangsung melalui pola komando yang bersifat hierarkis, melainkan melalui tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang memungkinkan setiap aktor menjalankan fungsi sesuai kapasitas dan kewenangannya. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan [Jiang \(2022\)](#) yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang efektif memerlukan kombinasi antara mobilisasi administratif dan partisipasi masyarakat. Pada kasus Desa Balak, mobilisasi administratif diwujudkan melalui pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Systemiq, sedangkan partisipasi masyarakat dibangun melalui regulasi desa, mekanisme pelayanan, dan sistem insentif yang memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat langsung dari program.

Pada dimensi *institution and regime characteristics*, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Program Banyuwangi Hijau sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa menginstitusionalisasikan program ke dalam kerangka kebijakan lokal. Peraturan Desa Balak Nomor 3 Tahun 2023 berfungsi sebagai instrumen kelembagaan yang menerjemahkan tujuan Program Banyuwangi Hijau ke dalam

aturan operasional yang dapat dijalankan oleh masyarakat. Regulasi tersebut mengatur tujuan pengelolaan sampah, pembagian peran antar aktor, kewajiban masyarakat, mekanisme pelayanan, pembiayaan, hingga sanksi administratif bagi pelanggaran yang terjadi.

Keberadaan regulasi ini menjadi sangat penting karena Program Banyuwangi Hijau pada dasarnya bukan program pengelolaan sampah berbasis desa dalam arti desa mengelola sampah secara mandiri dari hulu hingga hilir. Pengolahan sampah tetap dilakukan melalui TPS 3R yang dikelola dalam sistem Banyuwangi Hijau oleh Systemiq. Dalam konteks ini, desa berfungsi sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Systemiq dalam mengorganisasi partisipasi masyarakat pada tingkat rumah tangga. Dengan kata lain, pemerintah desa bertindak sebagai institusi yang menjembatani kebijakan makro dengan praktik pengelolaan sampah sehari-hari yang dilakukan masyarakat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan utama implementasi Program Banyuwangi Hijau di Desa Balak terletak pada kemampuan mengintegrasikan sistem pengelolaan sampah tingkat kabupaten dengan struktur kelembagaan desa yang telah memiliki legitimasi sosial dan kedekatan dengan masyarakat. Hasil penelitian ini memperluas temuan [Firmanudin & Rahmawati \(2022\)](#), yang menegaskan pentingnya kelembagaan lokal dalam mendukung pengelolaan sampah di tingkat desa. Pada kasus Desa Balak, kelembagaan lokal tidak berfungsi sebagai pengelola utama sampah, tetapi sebagai institusi yang memastikan sistem pengelolaan sampah kabupaten dapat diterima, dijalankan, dan dipatuhi oleh masyarakat.

Sementara itu, pada dimensi *compliance and responsiveness*, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Program Banyuwangi Hijau tergolong tinggi. Tingkat keikutsertaan masyarakat yang mencapai 818 kepala keluarga atau sekitar 67,16% dari total rumah tangga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah menerima mekanisme pengelolaan sampah yang dikembangkan melalui program tersebut. Kepatuhan tersebut tercermin dari kesediaan masyarakat untuk menjadi pelanggan layanan, melakukan pemilahan sampah dari sumbernya, membayar iuran pelayanan secara rutin, serta mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa Balak Nomor 3 Tahun 2023.

Menariknya, tingginya tingkat kepatuhan masyarakat justru melahirkan dinamika baru dalam implementasi program. Seiring meningkatnya jumlah pelanggan, masyarakat mulai menunjukkan ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Beberapa informan mengeluhkan keterlambatan pengambilan sampah yang menyebabkan sampah rumah tangga harus disimpan lebih lama sebelum diangkut. Dalam perspektif [Grindle \(2017\)](#), kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah bergerak dari tahap pembentukan kepatuhan menuju tahap responsivitas pelayanan. Masyarakat tidak lagi mempermasalahkan keberadaan kebijakan ataupun tujuan program, melainkan mulai menilai kualitas pelaksanaan kebijakan yang mereka terima. Dengan demikian, isu implementasi tidak lagi berpusat pada bagaimana membangun partisipasi masyarakat, tetapi bagaimana menjaga kualitas pelayanan agar mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah pengguna layanan.

Temuan ini sekaligus menjadi pembeda, dibandingkan berbagai penelitian terdahulu mengenai pengelolaan sampah di tingkat lokal. [Astuti & Kamil \(2024\)](#), [Rafidah et al., \(2025\)](#), serta [Fadhullah et al., \(2022\)](#) menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi dan kepatuhan masyarakat masih menjadi hambatan utama

implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Sebaliknya, kasus Desa Balak memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat telah terbentuk dalam tingkat yang relatif tinggi. Persoalan implementasi justru bergeser pada kemampuan kelembagaan dan sistem pelayanan dalam mengelola partisipasi yang terus berkembang. Pergeseran ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah tidak selalu ditandai oleh tingginya partisipasi masyarakat semata, tetapi juga oleh kemampuan institusi pelaksana untuk mempertahankan kualitas layanan ketika partisipasi tersebut telah berhasil dibangun.

Dengan demikian, tantangan utama keberlanjutan Program Banyuwangi Hijau di Desa Balak bukan lagi terletak pada upaya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, melainkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, sumber daya operasional, dan kualitas pelayanan agar mampu mengelola partisipasi masyarakat yang telah terbentuk. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada tahap lanjut sangat ditentukan oleh kemampuan sistem pelayanan untuk tumbuh seiring meningkatnya tingkat penerimaan masyarakat terhadap program.

6 | Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Program Banyuwangi Hijau di Desa Balak ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa menginstitutionalisasi program melalui Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 sehingga mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat yang mencapai 67,16% dari total rumah tangga menunjukkan bahwa program telah memperoleh penerimaan yang baik dari kelompok sasaran. Namun, tantangan implementasi tidak lagi terletak pada masalah partisipasi masyarakat, melainkan pada kapasitas pelayanan dan kelembagaan dalam mengelola partisipasi yang telah dicapai. Dengan demikian, keberlanjutan Program Banyuwangi Hijau ke depan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa, BUMDes, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan Systemiq dalam memperkuat kapasitas operasional serta menjaga kualitas pelayanan agar sejalan dengan pertumbuhan jumlah pengguna layanan.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

ORCID

Ali Wafa  <https://orcid.org/0009-0002-7701-1798>

Daftar Pustaka

- Astuti, W., & Kamil, I. (2024). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung (studi kasus: Kelurahan Pasirlayang). *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(5), 5328-5341. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15522>
- Debrah, J. K., Teye, G. K., & Dinis, M. A. P. (2022). Barriers and challenges to waste management hindering the circular economy in Sub-Saharan Africa. *Urban Science*, 6(3), 57. <https://doi.org/10.3390/urbansci6030057>
- Diani, M. R., Haniifah, D., & Dianty, F. R. (2024). Analisis proyeksi pertumbuhan penduduk dan volume sampah DKI Jakarta terhadap dampak yang ditimbulkan. *Journal of Waste and Sustainable Consumption*, 1(1), 27-45. <https://doi.org/10.61511/jwsc.v1i1.2024.691>

- Fadhullah, W., Imran, N. I. N., Ismail, S. N. S., Jaafar, M. H., & Abdullah, H. (2022). Household solid waste management practices and perceptions among residents in the East Coast of Malaysia. *BMC Public Health*, 22(1), 1. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-12274-7>
- Firmanudin, R., & Rahmawati, M. P. (2022). Implementasi kebijakan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan sampah di Desa Bangunrejo Kabupaten Kendal. *Journal Publicuho*, 5(3), 672–684. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.10>
- Fusch, P. I., & Ness, L. R. (2015). Are We There Yet? Data Saturation in Qualitative Research. *The Qualitative Report*, 20(9), 1408-1416. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2015.2281>
- Gerring, J. (2017). Qualitative methods. *Annual review of political science*, 20, 15-36. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-092415-024158>
- Grindle, M. S. (2017). Politics and policy implementation in the Third World.
- Hafizah, A., Pratiwi, D. A., Nuzlan, D. N. R., & Hasibuan, A. (2023). Analisis Dampak Sistem Pengelolaan Sampah TPA Terjun Di Kota Medan. *Zahra: Journal of Health and Medical Research*, 3(1), 320-329.
- Hemidat, S., Achouri, O., El Fels, L., Elagroudy, S., Hafidi, M., Chaouki, B., ... & Guo, J. (2022). Solid waste management in the context of a circular economy in the MENA region. *Sustainability*, 14(1), 480. <https://doi.org/10.3390/su14010480>
- Hill, M., & Hupe, P. (2021). Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance.
- Hossain, I., Mahmudul Haque, A. K. M., & Akram Ullah, S. M. (2025). Urban local governance and waste management: A study on two selected cities for sustainable solutions. In *A Vision for Environmental Sustainability: Overcoming Waste Management Challenges in Developing Countries* (pp. 335–355). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-89230-1_13
- Irawati, R., & Al Amin, I. I. (2024). Pengelolaan sampah dengan kearifan lokal “Tri Hita Karana”: Studi kasus Desa Kesiman Kertalangu, Bali. *Journal of Social Work and Empowerment*, 3(2), 74–91. <https://doi.org/10.58982/jswe.v3i2.587>
- Jiang, M. (2022). How public policies are implemented: A comparison of urban domestic waste classification policy implementation models. *Sustainability*, 14(22), 15480. <https://doi.org/10.3390/su142215480>
- Kurniawan, T. A., Liang, X., O’Callaghan, E., Goh, H., Othman, M. H. D., Avtar, R., & Kusworo, T. D. (2022). Transformation of solid waste management in China: Moving towards sustainability through digitalization-based circular economy. *Sustainability*, 14(4), 2374. <https://doi.org/10.3390/su14042374>
- Manalu, P., Tarigan, F. S., Girsang, E., & Ginting, C. N. (2022). Hambatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Binjai. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 21(3), 285–292. <https://doi.org/10.14710/jkli.21.3.285-292>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis*. sage.
- Maxwell, J. A. (2008). *Designing a qualitative study*. The SAGE handbook of applied social research methods, 2(7). <https://doi.org/10.4135/9781483348858.n7>
- Putriani, Y. (2025). Implementasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 14 Tahun 2022 tentang pengelolaan sampah di tingkat desa/kelurahan. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Rafidah, R., Rahmayanti, R., & Haderiah, H. (2025). Implementasi prinsip 3R dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Gattareng, Kabupaten Bulukumba. *Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat*, 25(1), 129–138. <https://doi.org/10.32382/sulo.v25i1.1322>
- Sapanli, K., Putro, F. A. D., Arifin, S. D., Putra, A. H., Andamari, H. A., & Anggraini, U. (2023). Pengelolaan sampah rumah tangga berbasis circular economy di tingkat desa: Pendekatan sistem dinamik. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 11(2), 141–155. <http://dx.doi.org/10.14710/jwl.11.2.141-155>
- Tampubolon, A. F., Hariyoko, Y., & Soesiantoro, A. (2023). Partisipasi masyarakat dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sedati Sidoarjo. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(2), 27–43.
- Wu, L., Zhu, Y., & Zhai, J. (2022). Understanding waste management behavior among university students in China: Environmental knowledge, personal norms, and the theory of planned behavior. *Frontiers in Psychology*, 12, 771723. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.771723>
- Yuliyanti, M., Anggraeni, D., & Setiyaningrum, I. F. (2024, December). *Kajian Analisis Pengelolaan Sampah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia dan Dampaknya terhadap Kesehatan*. In *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS* (Vol. 7).